

PERUBAHAN RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA PROBOLINGGO

TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas Taufik dan Hidayah-Nya, Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Probolinggo Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Probolinggo Tahun 2025 disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Sekretariat DPRD Kota Probolinggo Tahun 2025-2026 yang telah disempurnakan yang mengacu pada arah kebijakan dan target program prioritas RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2026 serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja (Rencana Kerja) atau Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD disetiap tahunnya dan dilaporkan di akhir pelaksanaan anggaran dalam Laporan Kinerja SKPD.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Probolinggo Tahun 2025 berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan beserta pagu indikatifnya dan target indikator kinerja ditahun 2025 sesuai dengan hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Probolinggo.

Kami menyadari bahwa Perubahan Renja Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kota Probolinggo belum sempurna sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu, kami mohon tanggapan dan koreksi dari semua pihak guna penyempurnaannya.

Probolinggo, Agustus 2025
SEKRETARIS DPRD KOTA ROBOLINGGO

Drs. TEGUH BAGUS S., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP.196606051990031015

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	i
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
Bab II Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I.....	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja s.d Triwulan I.....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan	14
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	14
2.4 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025	16
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	22
Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	25
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	23
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	24
Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	25
4.1 Program dan Kegiatan	27
Bab V Penutup	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Probolinggo Tahun 2025 dalam rangka memenuhi pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana setiap Sekretariat DPRD Kota Probolinggo diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025 yang meliputi Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Probolinggo.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kota Probolinggo Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Probolinggo Tahun 2025. Penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 mengacu pada KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang telah disepakati oleh Wali Kota Probolinggo dan Pimpinan DPRD Kota Probolinggo yang telah sesuai dengan tema rencana Pembangunan Nasional dan Provinsi, serta berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Probolinggo 2025-2026.

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 telah dibahas oleh DPRD sehingga diharapkan secara politis akan mengakomodasi kepentingan masyarakat melalui anggota DPRD sebagai representasi dari masyarakat Kota Probolinggo. Dalam konteks perencanaan pembangunan, Sekretariat DPRD Kota Probolinggo dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam penyusunan Perubahan RKPD Kota Probolinggo Tahun 2025 ini tidak dilakukan perubahan terhadap Tema, Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan hingga akhir Tahun anggaran. Proses penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Probolinggo Tahun 2025 tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2025, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan. Proses penyusunan renja disusun dengan tahapan sebagai berikut;

1. Persiapan Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kota Probolinggo;

2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Sekretariat DPRD Kota Probolinggo;
3. Penyusunan Rancangan Renja Sekretariat DPRD Kota Probolinggo;
4. Pelaksanaan Forum Sekretariat DPRD Kota Probolinggo/Lintas Sekretariat DPRD Kota Probolinggo;
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Sekretariat DPRD Kota Probolinggo;
6. Penetapan Renja Sekretariat DPRD Kota Probolinggo.

1.2 Landasan Hukum

Dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Probolinggo Tahun 2025 ini, berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana, Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja Sekretariat DPRD Kota Probolinggo;
6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Sekretariat DPRD Kota Probolinggo;
7. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD
8. Permendagri 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
10. Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Permendagri 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Perwali Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022;
14. Perda Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024;
15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Dana Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
18. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 98 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Probolinggo dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Probolinggo Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Probolinggo Tahun 2025 – 2026 ke dalam rencana kerja tahunan;
2. Sebagai dokumen perencanaan tahunan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan di Sekretariat DPRD Kota Probolinggo.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Probolinggo Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- Mewujudkan Pemerintah yang adaptif serta Pelayanan Publik Prima berbasis Digital;
- Penyelarasan arahan pembangunan Nasional terkait adanya efisiensi anggaran.
- Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025;
- Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Sekretariat DPRD Kota Probolinggo Tahun 2025;

- Sebagai tolok ukur untuk melakukan evaluasi kinerja tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja (R E N J A) Sekretariat DPRD Kota Probolinggo Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

- 1.1 Latar belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan.

Bab II : Evaluasi Renja Sekretariat DPRD Kota Probolinggo s.d Triwulan I 2025

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Probolinggo Triwulan I
Capaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Probolinggo
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Probolinggo
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota
Probolinggo
- 2.4 Review terhadap Rancangan P. RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III : Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kota Probolinggo

- 1.1 Tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Probolinggo
- 1.2 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Tahun 2025

BAB IV : Penutup

BAB II

EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA PROBOLINGGO TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Probolinggo sampai dengan Triwulan I dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Probolinggo

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Sekretariat DPRD Kota Probolinggo (Renja-SKPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) SKPD Sekretariat DPRD Kota Probolinggo Tahun 2025 dapat dilihat pada proyeksi realisasi anggaran program dan kegiatan di bawah ini :

Tabel TC 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kota Probolinggo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2025	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) 2023	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target (2024)	Realisasi (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program & kegiatan s/d 2025 (Triwulan I)	Tingkat Realisasi (%) (2025) (Triw I)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(kolom (5+7+9))	11=(kolom 10/9 x100)
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	100	100	100	100	100	100	300	300
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	100	100	100	100	100	100	300	300
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	4	4	100	4	2	50
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	6	6	6	100	6	3	50
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Sesuai Ketentuan	100	100	100	100	100	100	300	300
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37	36	39	39	100	39	36	92
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	1	1	1	100	1	0	0
4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan L Keuangan	1	1	12	12	100	12	3	25
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Kewenangan PD Sesuai Ketentuan	100	100	100	100	100	100	300	300
4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			3	3		36	36	100
4.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			5	5		0	0	0
4.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	37	36	20	20	100	36	36	100
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	100	100	100	100	100	100	25	25
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	10	10	100	12	3	25
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6	6	15	15	100	6	1	17
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	2	10	10	100	4	1	25

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2025	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) 2023	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target (2024)	Realisasi (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program & kegiatan s/d 2025 (Triwulan I)	Tingkat Realisasi (%) (2025) (Triw I)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(kolom (5+7+9)	11=(kolom 10/9 x100)
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	5	5	100	2	0	0
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1	0	0	0	0	1	0	0
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	12	12	100	12	3	25
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	20	30	30	100	12	3	25
4.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	0	1	1	100	1	0	0
4.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	12	12	12	100	12	3	25
4.02.01.2.07	Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yang terpenuhi	100	100	100	100	100	100	300	300
4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			0	0		4	3	75
4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			0	0			0	
4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah realisasi Mebel			15	15	100	3	0	0
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			71	71		45	15	33,33
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	100	100	100	100	100	100	300	300
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	12	12	100	12	3	25
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	12	100	12	3	25
4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9	9	12	12	100	12	3	25
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	100	12	3	25
4.02.01.2.09	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpenuhi	100	100	100	100	100	100	300	300
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	6	3	3	100	4	1	25

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2025	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) 2023	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target (2024)	Realisasi (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program & kegiatan s/d 2025 (Triwulan I)	Tingkat Realisasi (%) (2025) (Triw I)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(kolom (5+7+9))	11=(kolom 10/9 x100)
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14	14	18	18	100	19	5	26
4.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Persentase mebel yang terpelihara			4	4		4	8	200
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11	11	37	37	100	45	12	26,67
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1	1	100	1	0	0
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	100	0	0	0	163	1	
4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara			12	12			0	0
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD yang terpenuhi	100	100	100	100	100	100	300	300
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	30	30	30	30	100	30	30	100
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	90	90	120	120	100	120	0	0
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	30	2	30	30	100,00	30	1	3,33
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase layanan administrasi DPRD yang terpenuhi	100	100	100	100	100	100	300	300
4.02.01.2.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1	0	1	1	100	30	0	0
4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	7	7	7	7	100	12	3	25
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12	12	12	12	100	12	3	25
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat	73	78,53	74	85,07	115	74	238	321
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang terlaksana	100	100	100	100	100	100	300	300

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2025	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) 2023	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target (2024)	Realisasi (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program & kegiatan s/d 2025 (Triwulan I)	Tingkat Realisasi (%) (2025) (Triw I)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(kolom (5+7+9))	11=(kolom 10/9 x100)
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1	1	1	1	100	3	5	166,67
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	8	9	8	8	100	5	22	440
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang- Undangan	1	1	1	1	100	3	5	166,67
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1	3	1	1	100	3	7	233,33
4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1	0	1	1	100	1	2	200
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran	100	100	100	100	100	100	300	300
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1	1	1	1	100	1	3	300
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	1	1	1	100	1	3	300
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1	1	1	1	100	1	3	300
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1	1	1	1	100	1	3	300
4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1	0	1	0	0	1	1	100
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1	1	1	1	100	1	3	300
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100	100	100	100	100	100	300	300
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	15	15	15	15	100	12	42	350
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	15	15	15	15	100	12	42	350
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	15	15	15	15	100	12	42	350
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	15	15	15	15	100	0	30	#DIV/0!
4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	15	15	15	15	100	0	30	#DIV/0!
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1	1	1	1	100	1	3	300

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2025	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) 2023	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target (2024)	Realisasi (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program & kegiatan s/d 2025 (Triwulan I)	Tingkat Realisasi (%) (2025) (Triw I)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(kolom (5+7+9)	11=(kolom 10/9 x100)
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1	1	1	1	100	1	3	300
4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1	1	1	1	100	1	3	300
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	100	100	100	100	100	100	300	300
4.02.02.2.04.01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD			30	30			30	100
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	180	150	90	90	100	180	420	233
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	55	55	40	40	100	45	140	311,11
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	1	0	0	0	0	3	3	100
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7	7	7	7	100	6	20	333,33
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	0	0	0	0	0	1	1	100
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1	0	1	1	100	1	2	200
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Aspirasi Masyarakat yg diakomodir	100	100	100	100	100	100	300	300
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	30	30	30	30	100	30	90	300
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	90	90	60	60	100	90	240	266,67
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100	0	100	0	0	100	100	100
4.02.02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	0	0	1	0	0		0	#DIV/0!
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	0	0	1	1	100		1	#DIV/0!
4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Kerja Sama Daerah	100	0	100	0	0	100	100	100
4.02.02.2.07.01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	1	0	1	0	0	1	1	100
4.02.02.2.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	1	0	1	0	0	1	1	100
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD	100	100	100	100	100	100	300	300

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2025	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) 2023	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target (2024)	Realisasi (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program & kegiatan s/d 2025 (Triwulan I)	Tingkat Realisasi (%) (2025) (Triw I)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(kolom (5+7+9))	11=(kolom 10/9 x100)
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	550	670	450	487	108	400	1557	389
4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	30	30			#DIV/0!	0	30	#DIV/0!
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah yang difasilitasi			1	1		12	13	108,33
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	30	30	12	12	100	12	54	450

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Probolinggo

Analisis Kinerja Sekretariat DPRD Kota Probolinggo dalam menjalankan fungsi fasilitasi dan dukungan administrasi terhadap DPRD Kota Probolinggo secara sederhana dapat disampaikan sebagaimana tabel TC 30 berikut :

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Probolinggo

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target RENSTRA-PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Proyeksi Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Sekretariat DPRD				70	71	72	73	74	77,39	77,37	73,18	78,53	85,07	111%	109%	102%	108%	0%

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi (IKU OPD)	Target SPM / standar nasional (bila ada)	IKK (bila ada)	Target Renstra PD					Realisasi Capaian		Proyeksi	
				2020	2021	2022	2023	2024	2023	2024	2025	2026
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Sekretariat DPRD			70	71	72	73	74	78,53	85,07	86,00	86,10

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Probolinggo

Beberapa isu strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan baik program/kegiatan yang prioritas maupun yang bersifat penunjang adalah sebagai berikut:

1. Penyederhanaan prosedur pelayanan publik yang efektif dan efisien;
2. Dukungan sarana dan prasarana khususnya teknologi informasi (IT) secara internal berpengaruh terhadap kinerja Sekretariat DPRD, sedangkan secara eksternal berpengaruh pada kecepatan informasi terhadap masyarakat;
3. Keterbatasan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM);
4. Standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD relatif tinggi dan fluktuatif yang berpengaruh pada kapasitas dan volume kegiatan pelayanan.

Untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang langkah-langkah antisipasi yang perlu diambil adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan mengembangkan kapasitas SDM lebih intensif melalui pengadaan CPNS/PNS, pembinaan, pendidikan dan pelatihan;
2. Melakukan formasi pegawai secara efektif dan efisien guna mendukung kinerja SKPD.
3. Penyediaan sarana dan prasarana dalam mendukung transformasi digital.

Guna mendukung tercapainya langkah-langkah dimaksud, maka Strategi yang dilakukan yaitu:

1. Melakukan evaluasi dan penataan staf dan pejabat struktural dengan personel yang mempunyai kompetensi dan *comitted* terhadap tugas dan kewajibannya;
2. Peningkatan kualitas SDM dilingkungan Sekretariat DPRD Kota Probolinggo;
3. Pemberian reward terhadap pegawai berprestasi;
4. Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas SDM;
5. Peningkatan kualitas dokumen Renja Sekretariat DPRD sehingga dapat terwujud konsistensi dan keselarasan antar dokumen perencanaan dengan penganggaran seperti Renja DPRD, RKPD, Renstra SKPD, RPJMD.

Dengan adanya pemetaan dan evaluasi terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kota Probolinggo dalam menunjang Visi Misi Pemerintah kota Probolinggo yang mengampu urusan unsur penunjang yakni pada unsur staf utamanya dalam hal Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Baik sehingga dapat menunjang Meningkatkan Tata Kelola dan Pelayanan Publik yang mendukung Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Kota Probolinggo.

Pelaksanaan pelayanan tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Baik dalam hal memfasilitasi dan mendukung tugas dan Fungsi DPRD diperlukan ketepatan dan kecermatan dalam memberikan pelayanan sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada terutama dalam hal pentausahaan keuangan, hal ini penting dilakukan terkait tugas dan Fungsi DPRD yang erat hubungannya dengan urusan politik dimana berbagai unsur kepentingan yang begitu kompleks dan beragam macamnya. Kejelasan dan ketelitian dalam menyikapi aturan yang ada sangat diperlukan karena dari regulasi yang ada terdapat multitafsir yang berbeda di tiap pemangku kepentingan. Dengan adanya kejelasan regulasi maka dapat dijadikan pedoman yang jelas sehingga pelaksanaan pelayanan sesuai dengan rel dan ketentuan yang ada sehingga mengurangi dampak resiko.

2.4 Review terhadap Rancangan P. RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD merupakan proses membandingkan antara Rancangan Awal dengan Hasil Analisis Kebutuhan (Riil) dalam Renja SKPD. Untuk penyusunan rancangan awal 2025 didasarkan pada hasil Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dimana berakhirnya masa jabatan DPRD tahun 2019-2024 serta adanya pelantikan DPRD baru masa Jabatan 2024-2029. Adanya anggota DPRD yang baru maka selain Orientasi dan pemenuhan Kendaraan dan Penyediaan Pakaian Dinas dan atribut bagi anggota DPRD yang baru juga diperlukan peningkatan kapasitas DPRD yang baru menjabat terkait Pendalaman Tugas sesuai dengan Nomenklatur peruntukannya bagi Anggota DPRD di awal menjabat.

Uraian dapat dilihat pada tabel TC. 31 berikut ini :

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 2025	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan 2025	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3	252.000.000	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3	216.000.000			
4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6	49.000.000	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6	49.000.000			
4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1	6.300.000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1	6.300.000			
4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1	150.000.000	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1	300.000.000			
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Aspirasi Masyarakat yg diakomodir	100%	1.458.074.500	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Aspirasi Masyarakat yg diakomodir	100%	1.458.074.500			
4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	30	33.825.000	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	30	33.825.000			
4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	90	1.424.249.500	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	90	1.424.249.500			
4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100%	4.285.000	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100%	4.285.000			
4	02	02	2.06	0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1	3.250.000	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1	3.250.000			
4	02	02	2.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1	1.035.000	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1	1.035.000			
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD	100%	15.079.494.927	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD	100%	10.412.369.952			
4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	450	15.038.994.927	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	450	10.371.869.952			
4	02	02	2.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12	14.175.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12	14.175.000			
4	02	02	2.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	3	26.325.000	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	3	26.325.000			
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	100%	30.405.237.706	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	100%	30.460.082.507			
4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	100%	121.300.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	100%	111.100.000			
4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	60.700.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	54.000.000			
4	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	60.600.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	57.100.000			
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Sesuai Ketentuan	100%	4.910.184.160	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Sesuai Ketentuan	100%	5.049.554.972			
4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36	4.686.658.624	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36	4.845.786.404			
4	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	39.794.516	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	42.510.182			

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 2025	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan 2025	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
4	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	183.731.020	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	161.258.386	
4	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Administrasi BMD Sesuai Ketentuan	100%	50.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Administrasi BMD Sesuai Ketentuan	100%	50.000.000	
4	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	50.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	50.000.000	
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian Kewenangan PD Sesuai Ketentuan	100%	175.912.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian Kewenangan PD Sesuai Ketentuan	100%	160.200.000	
4	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	36	43.200.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	36	43.200.000	
4	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	36	132.712.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	36	117.000.000	
4	02	01	2.05		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	100%	943.951.800	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	100%	986.968.800	
4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	346.530.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	373.530.000	
4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6	94.997.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6	94.997.000	
4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	27.600.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	27.600.000	
4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	40.580.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	40.580.000	
4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1	9.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1	0	
4	02	01	2.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	64.134.000	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	64.134.000	
4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	175.050.800	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	175.052.800	
4	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	30.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	30.000.000	
4	02	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	156.060.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	181.075.000	
4	02	01	2.06		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase BMD yang terpenuhi	100%	3.256.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase BMD yang terpenuhi	100%	3.514.781.000	
4	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4	3.000.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4	2.734.468.000	Pengadaan mobil Pimpinan

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 2025	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan 2025	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
4	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	50.000.000	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	115.532.000	
4	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	45	206.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	45	664.781.000	
4	02	01	2.07		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	100%	2.006.659.052	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	100%	1.958.849.820	
4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	49.947.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	53.761.000	
4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	306.260.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	323.847.500	
4	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	583.181.720	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	576.791.120	
4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	1.067.270.332	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	1.004.450.200	
4	02	01	2.08		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang terpenuhi	100%	1.318.150.600	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang terpenuhi	100%	1.688.752.100	
4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	148.521.900	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	148.521.900	
4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19	235.619.900	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19	235.619.900	
4	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	4	40.000.000	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	4	40.000.000	
4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45	227.170.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45	253.187.500	
4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	416.250.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	751.771.000	
4	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	163	250.588.800	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana PENDUKUNG Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	163	259.651.800	
4	02	01	2.10		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD yang terpenuhi	100%	17.460.528.094	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD yang terpenuhi	100%	16.807.023.815	
4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	30	17.070.528.094	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	30	16.342.023.815	
4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	120	300.000.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	150	375.000.000	
4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		Jumlah Orang yang Mengikuti <i>Medical Check Up</i> DPRD	30	90.000.000	Pelaksanaan <i>Medical Check Up</i> DPRD		Jumlah Orang yang Mengikuti <i>Medical Check Up</i> DPRD	30	90.000.000	
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD		Persentase layanan administrasi DPRD yang terpenuhi	100%	162.552.000	Layanan Administrasi DPRD		Persentase layanan administrasi DPRD yang terpenuhi	100%	132.852.000	
4	02	01	2.16	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	30	1.800.000	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	30	1.800.000	
4	02	01	2.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12	49.512.000	Fasilitasi Fraksi DPRD		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12	49.512.000	
4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12	111.240.000	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12	81.540.000	
									51.590.742.898					47.146.474.678	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sekretariat DPRD Kota Probolinggo dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota Probolinggo melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan langsung terhadap anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan. Terkait dengan tugas pokok dan fungsi tersebut maka tidak dilakukan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat karena tupoksinya tidak menyentuh langsung kepentingan masyarakat.

Tabel T-C.32					
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025					
Provinsi/Kabupaten/Kota Probolinggo					
SKPD : SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KOTA PROBOLINGGO

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Probolinggo

Adapun hubungan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Probolinggo beserta Indikator Kinerja Utama dapat disajikan dalam Tabel III.1 sebagaimana berikut ini :

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Utama Tabel III.1

Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Probolinggo

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Utama Pada Tahun						
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Mewujudkan pemerintahan yang adaptif, serta pelayanan publik prima	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Peran DPRD Sesuai dengan Fungsinya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Sekretariat DPRD	70	71	72	73	74	86	86,10

Dari tabel tersebut dirumuskan bahwa indikator sasaran adalah Survey Kepuasan DPRD terhadap Sekretariat DPRD dimana target kinerja untuk tahun **2025** adalah **86,00**

3.2 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025

- **Program**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan instansi. Untuk itu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan tujuan dan sasaran sebelum program dan kegiatan diimplementasikan lebih lanjut kedalam suatu rencana kinerja tahunan dalam bentuk kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Oleh karena itu, sebelum mengarah dalam penjabaran lebih lanjut ke dalam suatu rencana kinerja tahunan dalam bentuk kegiatan perlu dilakukan sinkronisasi antara tujuan, sasaran, dan strategi sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel III.2

Sinkronisasi Tujuan, Sasaran dan Strategi

Tujuan	Sasaran	Strategi	
		Kebijakan	Program
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Sekretariat DPRD kepada DPRD	Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD terhadap peran DPRD sesuai dengan fungsinya	Peningkatan kualitas layanan penyelenggaraan kinerja Lembaga Legislatif	<p><u>Program Utama :</u> PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</p> <p><u>Program Pendukung :</u> PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</p>

Program Pada Sekretariat DPRD Kota Probolinggo

Dalam menjalankan visi dan misi RPD 2025-2026 Sekretariat DPRD Kota Probolinggo melaksanakan 2 program :

Dari program tersebut diuraikan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut :

Program Utama :**2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**

1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
2. Pembahasan Kebijakan Anggaran
3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
4. Peningkatan Kapasitas DPRD
5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
7. Fasilitasi Tugas DPRD

Program Pendukung :**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

10. Layanan Administrasi DPRD

Pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Probolinggo Tahun 2025 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Selanjutnya untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

Adapun Rencana Kerja berdasarkan program dan kegiatan, output, outcome serta pendanaan pada Sekretariat DPRD Kota Probolinggo adalah sebagai berikut:

TABEL T-C 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan
RKPD Tahun 2025 Kota Probolinggo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Tahun 2025			Indikator Kinerja Program (outcomes/ Kegiatan (output) Tahun 2025	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perubahan Tahun 2025		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	
1				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4	02			SEKRETARIAT DPRD			51.590.742.898				47.146.474.678	
4	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	SETWAN	100	30.405.237.706	DAU		100	30.460.082.507
4	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%		100	121.300.000			100	111.100.000
4	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Sesuai Ketentuan		100	4.910.184.160			100	5.049.554.972
4	02	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Sesuai Ketentuan		100	50.000.000			100	50.000.000
4	02	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Kewenangan PD Sesuai Ketentuan		100	175.912.000			100	160.200.000
4	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan		100	943.951.800			100	986.968.800
4	02	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yang terpenuhi		100	3.256.000.000			100	3.514.781.000
4	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu		100	2.006.659.052			100	1.958.849.820
4	02	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpenuhi		100	1.318.150.600			100	1.688.752.100
4	02	01	2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD yang terpenuhi		100	17.460.528.094			100	16.807.023.815
4	02	01	2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase layanan administrasi DPRD yang terpenuhi		100	162.552.000			100	132.852.000
4	02	02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat		86,00	21.185.505.192	DAU		78,80	16.686.392.171
4	02	02	2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang terlaksana		100	1.344.452.767			100	1.829.671.243
4	02	02	2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran		100	374.062.298			100	346.541.676
4	02	02	2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		100	387.443.700			100	398.537.800
4	02	02	2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD		100	2.537.692.000			100	2.236.912.000
4	02	02	2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Aspirasi Masyarakat yg diakomodir		100	1.458.074.500			100	1.458.074.500
4	02	02	2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		100	4.285.000			100	4.285.000
4	02	02	2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD		100	15.079.494.927			100	10.412.369.952

BAB V

PENUTUP

Satuan Kerja Sekretariat DPRD Kota Probolinggo berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Probolinggo Tahun 2025-2045 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Sekretariat DPRD Kota Probolinggo (Renja-SKPD).

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Probolinggo tahun 2025, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang akan dicapai pada tahun 2025 dan bermanfaat sebagai penjabaran dalam pelaksanaan tupoksi. Agar Rencana Kerja ini dapat dipahami oleh semua Pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Probolinggo, maka perlu dikomunikasikan secara terus menerus sehingga dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan program secara optimal, efisien dan efektif.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Probolinggo tahun 2025 ini disusun, dengan memperhatikan kebutuhan yang bersifat strategis, namun disadari bahwa masih banyak terdapat hambatan, kekurangan sehingga masih jauh dari sempurna. Untuk itu masukan, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan guna untuk menunjang keberhasilan program/kegiatan Sekretariat DPRD pada tahun-tahun berikutnya.